

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu apakah yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Artinya pemegang kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Segala kebijakan mengenai putusan pemerintah haruslah dirundingkan dengan rakyat. Istilah demokrasi itu sendiri berasal dari negara Yunani, *demos* yang artinya rakyat, dan *kratos* yang artinya kekuasaan. Kata demokrasi itu sendiri diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles, yaitu sebagai bentuk suatu pemerintahan yang mengatur bahwa kekuasaan itu berada di tangan rakyat.

Salah satu agenda politik di negara yang menganut sistem demokrasi adalah Pemilihan Umum atau yang biasa di singkat "Pemilu". Pemilu dianggap sebagai bentuk paling riil dari demokrasi serta wujud paling konkret keikutsertaan (partisipasi) rakyat dalam penyelenggaraan negara. Oleh sebab itu, sistem dan penyelenggaraan Pemilu hampir selalu menjadi pusat perhatian utama karena melalui penataan, sistem dan kualitas penyelenggaraan Pemilu diharapkan dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan demokratis. Pemilu sangatlah penting bagi sebuah negara, dikarenakan:

1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat
2. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
3. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.
4. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.

Indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum (Pemilu) secara reguler, yaitu Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009 untuk pemilihan calon legislatif (Pileg) dan pemilihan calon presiden dan wakil presiden (Pilpres). Secara spesifik dunia internasional memuji, bahwa Pemilu Tahun 1999 sebagai Pemilu pertama di era Reformasi yang telah berlangsung secara aman, tertib, jujur, dan adil dipandang memenuhi standar demokrasi global sehingga Indonesia dinilai telah melakukan lompatan demokrasi. Dan baru tiga kali menyelenggarakan pemilu presiden secara langsung, yaitu tahun 2004, 2009 dan 2014.

Salah satu tolak ukur keberhasilan Pemilu adalah tingginya jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. Hal ini karena Pemilu merupakan instrumen utama bagi terlaksananya dukungan rakyat dalam suatu demokrasi perwakilan. Pemilihan umum menunjukkan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat dan memiliki kepercayaan dari rakyat dan bahwa rakyat memberikan jaminan dukungan bagi para politisi dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan perubahan situasi dan kondisi. Ada berbagai alasan

mengapa pemilih tidak menggunakan hak suaranya. Diantaranya adalah mereka yang dengan sengaja tidak mau menggunakan hak suaranya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak suaranya. Perilaku ini sering disebut dengan istilah “golongan putih”. Pesimisme terhadap hasil Pemilu merupakan sikap yang mendorong golput. Pesimisme ini disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap partai politik yang pada akhirnya menimbulkan sikap tidak mempercayai Pemilu sebagai sesuatu yang berguna.

Pada pemilu presiden 2014 komisi pemilihan umum (KPU) menekankan angka golput menurun dari tahun-tahun sebelumnya pada kisaran 25%, tetapi tidak berhasil. Pada tahun 2004 angka golput mencapai 24%, sedangkan pada tahun 2009 mengalami peningkatan menjadi 27,7%. Tahun 2014 angka golput yang diharapkan KPU menurun pada angka 25%, tetapi kenyataannya berbeda karena angka golput mengalami kenaikan pada angka 29,8% (Angga. 2014).

Realitas tersebut mengindikasikan bahwa telah terjadi apatisme di kalangan pemilih, disaat arus demokratisasi dan kebebasan berpolitik masyarakat sedang marak-maraknya. Tentunya potensi Golput dalam pesta demokrasi nasional maupun lokal tersebut kiranya cukup mengkhawatirkan bagi perkembangan demokrasi yang berkualitas. Sebab potensi Golput yang menunjukkan eskalasi peningkatan dapat berimplikasi melumpuhkan demokrasi, karena merosotnya kredibilitas kinerja partai politik sebagai mesin pembangkit partisipasi politik. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih

orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun sebagai Presiden dan wakil presiden. Hak memberikan suara atau memilih (*right to vote*) merupakan hak dasar (*basic right*) setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Jaminan terhadap hak ini telah dituangkan baik dalam Konstitusi (UUD 1945-Amandemen) maupun UU, yakni UU No. 39/1999) tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Hak untuk memilih wakil rakyat atau presiden dan wakil presiden sepenuhnya adalah hak asasi subyektif dari setiap individu. Penggunaannya tidak boleh diintervensi oleh siapapun, baik itu negara maupun masyarakat.

Sehingga, hal yang perlu dilakukan agar dapat mencegah golput adalah melakukan gerakan kultural untuk mengembalikan semangat memilih, menggunakan hak pilih dalam Pemilu maupun Pilkada untuk melawan budaya golput. Bisa dilakukan kampanye besar-besaran, melibatkan semua kelompok dalam masyarakat. Dan perlunya adanya pendidikan dan sosialisasi politik kepada pemilih, khususnya bagi pemula untuk tidak menjadi golput dan memahami arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilihan umum di Indonesia telah memberikan sosialisasi mengenai Pemilu melalui media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. KPU dengan dibantu Pemerintah Daerah selalu mengingatkan warga Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu, selain itu

agar para pemilih menggunakan hati nuraninya dalam Pemilu terutama bagi pemilih pemula yang baru pertama kali ikut serta dalam Pemilu. Sosialisasi diharapkan semakin menyadarkan para pemilih pemula tentang pentingnya menggunakan hak suara karena Pemilu merupakan proses demokrasi yang menentukan arah jalannya pemerintahan dan kemajuan bangsa.

Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh pengukuran tingkat ketertarikan partisipasi Pemilu dari segi usia seorang remaja. Dimana arti remaja itu sendiri adalah masa penghubung atau peralihan antara masa kanak – kanak dengan masa dewasa. Menurut Yusuf (2002 : 184) masa remaja dibagi menjadi tiga :

1. Masa remaja awal, yaitu antara umur 12 – 15 tahun
2. Masa remaja madya, yaitu antara umur 15 – 18 tahun
3. Masa remaja akhir, yaitu antara umur 19 – 22 tahun

Sedangkan untuk populasinya sendiri penulis mangambil contoh pada masa remaja akhir yaitu usia antara 19 – 22 tahun atau setara dengan Mahasiswa karena pada masa ini terjadi perubahan besar dalam hal fungsi rohaniah dan jasmaniahnya. Selain berlangsung pertumbuhan jasmani yang cepat, juga perkembangan intelektual yang sangat sensitif sehingga minat remaja di dunia luar sangat besar. Perkembangan intelektual membangunkan berbagai fungsi psikis dan rasa ingin tahu sehingga tumbuh dorongan yang kuat untuk mencari ilmu pengetahuan dan pengalaman baru (Yusuf, 2002: 184).

Mahasiswa merupakan fase usia yang dinamis, mempunyai keinginan kuat untuk mencoba hal – hal atau pengalaman yang baru, menjalin hubungan sosial yang lebih akrab terutama dengan teman sebaya ataupun dengan relasi dan menyukai yang bersifat praktis. Ke depan, diharapkan peranan mahasiswa dalam proses demokrasi, mampu tampil sebagai organ bangsa yang memiliki kredibilitas dan kualitas mahasiswa yang bisa dibanggakan. Yaitu mahasiswa yang mampu memberikan kontribusi nyata kepada bangsa untuk mewujudkan demokratisasi yang sesungguhnya sebagai calon pemilih/ menggunakan hak suaranya sebaik-baiknya. Mahasiswa yang memiliki sifat dinamis, kreatif, responsif dan peka terhadap problema-problema kemasyarakatan.

Seperti halnya mahasiswa progdi Ilmu Komunikasi angkatan 2010 Universitas Muhamadiyah Surakarta, dimana mahasiswa yang dinilai cerdas dalam mengambil keputusan dan kritis terhadap sesuatu masalah atau fenomena, bisa ikut menjadi pemilih/ penyumbang suara yang aktif dan memberikan warna baru bagi pesta demokrasi lima tahunan ini. Kenapa penulis memilih Mahasiswa angkatan 2010 dikarenakan menurut penulis mahasiswa 2010 adalah mahasiswa tingkat akhir yang dinilai peka terhadap fenomena demokrasi di tanah air dan peduli akan kemajuan bangsa dengan cara berpartisipasi dalam Pemilu. Tidak itu saja dilihat dari kehidupan sehari-harinya mahasiswa yang menjadi obyek penulis mempunyai pengetahuan yang luas dalam hal politik dan demokrasi sesuai dengan matakuliah yang telah ditempuh yaitu dasar-dasar pilitik dan komunikasi politik.

Peneliti memfokuskan penelitian pada pemilihan umum Presiden tahun 2014 dikalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Surakarta karena angka golput pada Pilpres tahun 2014 tersebut sangat tinggi dibanding dua tahun sebelumnya. Dari masalah peningkatan angka golput tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui dengan adanya sosialisasi “Anti Golput” apakah mempengaruhi partisipasi politik dikalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta dan mengetahui tanggapan Mahasiswa tentang sosialisasi “Anti Golput” dan pemilu Presiden.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tia Subekti, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, tahun 2013 dengan judul “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum: Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013”. Penelitian ini fokus pada partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum khususnya melihat turn of voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013. Partisipasi penting untuk diteliti mengingat keberhasilan dari sebuah pemilu dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori partisipasi politik dan teori pilihan rasional. Terdapat dua rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, pertama, bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan tahun 2013? Kedua, bagaimana rasionalitas masyarakat dalam partisipasi politik dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten

Magetan tahun 2013? Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, terdapat upaya dari KPUD, Partai Politik, Media masa, dan civil society dalam meningkatkan partisipasi politik. Kedua, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik. Pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik. Namun sosok pasangan kandidat dan visi misi juga tidak bisa diabaikan dalam pengaruhnya terhadap partisipasi politik masyarakat.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Rahmi Hanifa, dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Politik Terhadap Orientasi Politik Pemilih (Studi Terhadap Guru dan Dosen di Kota Padang) tahun 2012.” Skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaruh sosialisasi politik melalui media massa dan sosialisasi politik melalui pekerjaan terhadap orientasi politik pemilih guru dan dosen di Kota Padang. Proses sosialisasi politik akan mempengaruhi cara pandang dan penilaian atas aspek-aspek kehidupan politik seseorang. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh antara agen-agen sosialisasi politik terhadap orientasi politik seseorang, dimana penelitian ini menggunakan agen-agen sosialisasi politik media massa dan sosialisasi politik melalui pekerjaan. Dari hasil penganalisaan, peneliti menemukan bahwa sosialisasi politik melalui media massa dan sosialisasi melalui pekerjaan mempengaruhi orientasi politik guru dan dosen di Kota

Padang. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat hubungan sosialisasi politik melalui pekerjaan dan melalui media massa. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel sosialisasi politik melalui pekerjaan dan media massa mempunyai pengaruh terhadap orientasi politik guru dan dosen.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Tia Subekti dan Rahmi Hanifa adalah, jika penelitian yang dilakukan Tia Subekti berfokus untuk mengetahui upaya apa yang dapat meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilu PILKADA Kabupaten Magetan tahun 2013, dan mengetahui bagaimana rasionalitas masyarakat dalam partisipasi politik pada Pemilu PILKADA Kabupaten Magetan tahun 2013 apakah memberikan pengaruh atau tidak dalam menentukan partisipasi politik. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Hanifa bertujuan mengetahui sosialisasi politik melalui agen-agen sosialisasi politik media massa dan sosialisasi politik melalui pekerjaan apakah mempengaruhi orientasi politik pemilih dikalangan guru dan dosen di kota Padang. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis untuk mengetahui apakah sosialisasi “Anti Golput” mempengaruhi partisipasi Pemilu Presiden pada tahun 2014 dikalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis ingin mengetahui pengaruh sosialisasi pemerintah mengenai anti golput yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemilihan umum Presiden di Indonesia terhadap partisipasi

pemilu tahun 2014 dikalangan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Dari hasil uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Hal ini berfungsi sebagai pembatas supaya penelitian ini tidak keluar dari permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan apa yang ditulis pada latar belakang maka rumusan masalah yang dikaji adalah :

Adakah pengaruh sosialisasi “Anti Golput” terhadap partisipasi pemilu Presiden tahun 2014 dikalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi “Anti Golput” terhadap partisipasi pemilu Presiden tahun 2014 dikalangan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memeberikan manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Sebagai wacana tambahan dan sebagai bahan pembelajaran ataupun sebagai dasar untuk melakukan penelitian sejenis.

Hasil ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang komunikasi, khususnya bidang studi strategi komunikasi, komunikasi massa, komunikasi politik dll.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaganya yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Agar sosialisasi dilakukan jelang pemilu untuk menekan angka golput yang ditunjukkan pada masyarakat khususnya pemilih pemula seperti mahasiswa, mereka dapat sadar dan turut partisipasi dalam Pemilu. Karena mahasiswa adalah generasi muda yang di anggap kritis juga peduli pada negara dan bangsa ini.

E. Landasan Teori

1. Komunikasi

a. Pengertian Komunikasi

Komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat berpengaruh besar bagi seseorang dalam hidup bermasyarakat. Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Mereka ingin mengetahui tentang lingkungannya disekitar, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya sendiri. Rasa ingin

tahu inilah yang memaksa manusia perlu adanya komunikasi (Cangara, 2002 : 1).

Dalam kehidupan bermasyarakat, orang yang tidak pernah berkomunikasi dengan orang lain maka dirinya akan jauh atau terisolasi dari masyarakat lainnya. Maka dari itu manusia di dunia ini harus mampu berkomunikasi yang baik dengan orang lain.

Dari berbagai definisi komunikasi yang ada, Menurut Deddy Mulyana dalam bukunya *Suatu Pengantar Ilmu Komunikasi* mencoba menjabarkan tujuh definisi yang dapat mewakili sudut pandang dan konteks pengertian komunikasi menurut para tokoh. Definisi – definisi tersebut antara lain:

- 1) Menurut *John R. Wenburg dan William W. Wilmot* menyatakan “Komunikasi adalah usaha untuk memperoleh makna.”
- 2) Menurut *Donald Byker dan Loren J. Anderson* menyatakan “Komunikasi (manusia) adalah berbagai informasi antara dua orang atau lebih.”
- 3) Menurut *William I. Gordon* menyatakan “Komunikasi secara ringkas dapat didefinisikan sebagai transaksi dinamis yang melibatkan gagasan dan perasaan.”
- 4) Menurut *Judy C. Pearson dan Paul E. Nelson* menyatakan “Komunikasi adalah proses memahami dan berbagai makna.”

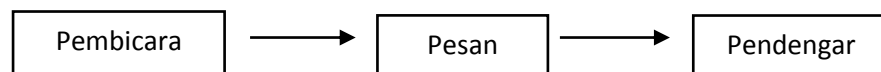
- 5) Menurut *Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss* menyatakan “Komunikasi adalah proses pembentukan makna diantara dua orang atau lebih.”
- 6) Menurut *Diana K. Ivy dan Phil Backlund* menyatakan “Komunikasi adalah proses yang terus berlangsung dan dinamis menerima dan mengirim pesan dengan tujuan berbagai makna.”
- 7) Menurut *Karl Erik Rosengren* menyatakan “Komunikasi adalah interaksi subjektif purposif melalui bahasa manusia yang berartikulasi ganda berdasarkan simbol – simbol.” (Mulyana, 2008: 76).

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi, jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Artinya komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber , pesan, media, penerima, dan efek (Cangara 2006 : 21).

b. Model komunikasi

Dalam sebuah komunikasi juga terdapat beberapa model-model komunikasi yang memudahkan seseorang dalam mencerna arti dalam sebuah penyampaian pesan antara satu orang ke orang lain. Misalnya model komunikasi yang disampaikan oleh Aristoteles adalah komunikasi paling klasik yang sering juga disebut model retorik. Aristoteles adalah tokoh paling dini mengkaji komunikasi, yang intinya adalah persuasi. Komunikasi terjadi ketika seorang pembicara

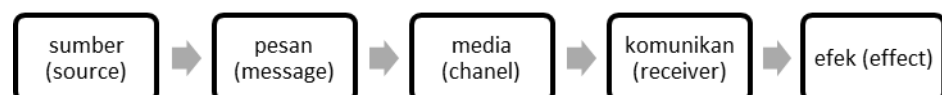
menyampaikan pembicaraanya kepada khalayak dalam upaya mengubah sikap mereka. Tepatnya ia mengemukakan tiga unsur dasar proses komunikasi yaitu pembicara (*speaker*), pesan (*messeg*) dan pendengar (*listener*) (Mulyana, 2008: 145-146).



Gambar 1.1 Model Aristoteles

(Sumber: *Michael Burgoon. Approaching Speech/ Communication. New York: Holt, Renhart & Winston, 1974, hlm 10.*)

Selain itu juga ada model komunikasi yang dikemukakan oleh Harold Lasswell (1948), yang menyatakan model komunikasi Lasswell berupa ungkapan verbal yakni : “ *Who, Say What, In Which Channel, To Whom, With What Effect?*”. Model ini dikemukakan Lasswell (1948) yang menggambarkan proses komunikasi dan fungsi-fungsi yang diembannya dalam masyarakat. Lasswell mengemukakan tiga fungsi komunikasi yaitu pertama, pengawasan lingkungan. Kedua, korelasi berbagai bagian terpisah dalam masyarakat yang merespon lingkungan. Dan ketiga, transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi lainnya (Mulyana, 2008: 147).



Gambar 1.2 Model Harold Lasswell

- 1) *Who* (siapa/sumber). Sumber/komunikator adalah pelaku utama/pihak yang mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi atau yang memulai suatu komunikasi, bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun suatu negara sebagai komunikator.
- 2) *Says What* (pesan). Apa yang akan disampaikan/dikomunikasikan kepada penerima(komunikan), dari sumber(komunikator) atau isi informasi. Merupakan seperangkat symbol verbal/non verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan/maksud sumber tadi. Ada 3 komponen pesan yaitu makna, symbol untuk menyampaikan makna, dan bentuk/organisasi pesan.
- 3) *In Which Channel* (saluran/media). Wahana/alat untuk menyampaikan pesan dari komunikator (sumber) kepada komunikan (penerima) baik secara langsung (tatap muka), maupun tidak langsung (melalui media cetak/elektronik dll).
- 4) *To Whom* (untuk siapa/penerima). Orang/ kelompok/ organisasi/ suatu negara yang menerima pesan dari sumber. Disebut tujuan (*destination*)/ pendengar (*listener*)/ khalayak (*audience*)/ komunikan / penafsir/ penyandi balik (*decoder*).
- 5) *With What Effect* (dampak/efek). Dampak/efek yang terjadi pada komunikan (penerima) setelah menerima pesan dari sumber, seperti perubahan sikap, bertambahnya pengetahuan, dll (Cangara 2006: 23-26).

c. Komunikasi Massa

Terdapat berbagai macam pendapat tentang pengertian komunikasi massa. Ada yang menilai dari segmen khalayaknya, dari segi medianya dan ada pula dari sifat pesanya.

Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung dimana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar dan film (Cangara, 2002: 35-36).

Dibandingkan dengan bentuk-bentuk komunikasi sebelumnya, maka komunikasi massa memiliki ciri tersendiri. Sifat pesannya terbuka dengan khalayak yang variatif, baik dari segi usia, agama, suku, pekerjaan maupun dari segi kebutuhan (Cangara, 2002: 37).

Pesan komunikasi massa berlangsung satu arah dan tanggapan baliknya lambat (tertunda) dan sangat terbatas. Tetapi dengan perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat, khususnya media massa elektronik seperti radio dan televisi maka umpan balik dari khalayak bisa dilakukan dengan cepat kepada penyiar (Cangara, 2006: 36).

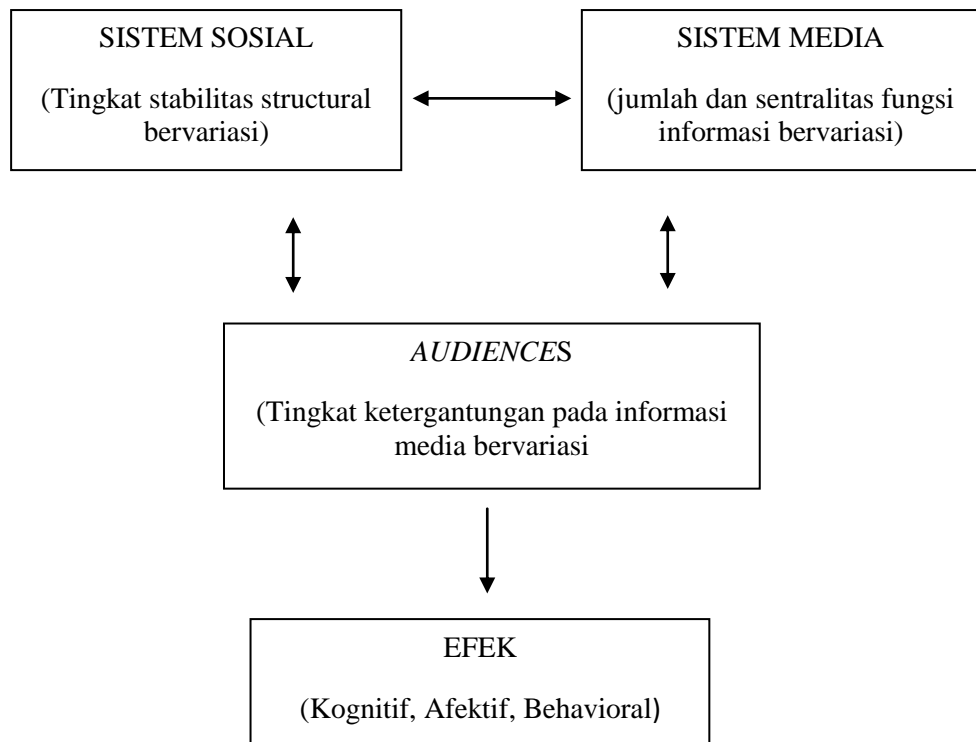
Selain itu sifat penyebaran pesan melalui media massa berlangsung begitu cepat, serempak dan luas. Maka ia mampu mengatasi jarak dan waktu, serta tahan lama bila didokumentasikan. Dari segi ekonomi, biaya produksi komunikasi massa cukup mahal

dan memerlukan dukungan tenaga kerja relative banyak mengelolanya (Cangara, 2006: 36).

Komunikasi massa dapat berfungsi sebagai alat untuk menyebarluaskan informasi, meratakan pendidikan, merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kegembiraan dalam hidup seseorang. Dengan pertumbuhan media yang sangat cepat maka komunikasi massa mempunyai fungsi yang banyak yaitu sebagai informasi, sosialisai, motivasi, bahan diskusi, pendidikan, memajukan kebudayaan, hiburan dan intergasi (Cangara, 2006: 57-58).

TEORI DEPENDENSI

Dalam Modul Teori Komunikasi Perspektif, Ragam, & Aplikasi oleh Rohim (2009: 182) menyatakan bahwa Teori ini dikembangkan oleh Sandra Ball-Rokeach dan Melvin L. DeFleur (1976) memfokuskan perhatiannya pada kondisi struktural suatu masyarakat yang mengatur kecenderungan terjadinya suatu efek media massa. Teori ini pada dasarnya merupakan suatu pendekatan struktur sosial yang berangkat dari gagasan mengenai sifat suatu masyarakat modern (atau masyarakat massa), di mana media massa dapat dianggap sebagai sistem informasi yang memiliki peran penting dalam proses pemeliharaan, perubahan, dan konflik pada tataran masyarakat, kelompok atau individu dalam aktivitas sosial. Teori mereka secara ringkas digambarkan dalam model berikut:



Pemikiran terpenting dari teori ini adalah bahwa dalam masyarakat modern, *audience* menjadi tergantung pada media massa sebagai sumber informasi bagi pengetahuan tentang dan orientasi kepada apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Jenis dan tingkat ketergantungan akan dipengaruhi oleh sejumlah kondisi struktural, meskipun kondisi terpenting terutama berkaitan dengan tingkat perubahan, konflik atau tidak stabilnya masyarakat tersebut. Dan kedua, berkaitan dengan apa yang dilakukan media yang pada dasarnya melayani berbagai fungsi informasi. Dengan demikian teori ini menjelaskan saling hubungan antara dua perangkat variabel utama dan menentukan jenis efek tertentu sebagai hasil interaksi antara dua variabel tersebut.

2. Media Massa sebagai sarana Sosialisasi

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai suatu tujuan. Namun, untuk mencapai suatu tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, tetapi harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Demikianlah pula strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu, tergantung kepada situasi dan kondisi (Effendy, 2008: 29)

Media massa adalah alat-alat dalam komunikasi yang bisa menyebarkan pesan secara serempak, cepat kepada *audience* yang luas dan heterogen. Kelebihan media massa dibandingkan dengan jenis komunikasi lain adalah bisa mengatasi hambatan ruang dan waktu. Bahkan media massa mampu menyebarkan pesan hampir seketika pada waktu yang tidak terbatas (Nurudin, 2007: 9).

Media massa pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni media massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah. Sedangkan media elektronik yang memenuhi kriteria media massa adalah

radio siaran, televisi, film, media on-line internet (Ardianto dkk, 2009: 103).

Fungsi komunikasi massa menurut Dominick (2001) dalam buku Komunikasi massa yang di tulis oleh Ardianto dkk, ialah terdiri dari *surveillance* (pengawasan), *interpretation* (penafsiran), *linkage* (keterkaitan), *transmission of values* (penyebaran nilai/sosialisasi), *entertainment* (hiburan).

Fungsi penyebaran nilai tidak kentara *transmission of values*. Fungsi ini juga di sebut *sosialization* (sosialisasi). Sosialisasi mengacu kepada cara, dimana individu mengadopsi perilaku dan nilai kelompok. Dengan kata lain, media mewakili kita dengan model peran yang kita amati dan harapan untuk menirunya. Di antara semua media massa, televisi sangat berpotensi untuk terjadinya sosialisasi (penyebaran nilai) pada anak muda, terutama anak-anak yang telah melampaui usia 16 tahun (Ardianto dkk, 2009: 16-17).

3. Sosialisasi Politik

Seseorang harus belajar untuk memahami dan menghayati tatanan masyarakat, negara, dan bangsanya. Proses belajar untuk memahami dan menghayati tatanan itulah yang disebut dengan sosialisasi. Apabila seseorang itu belajar memahami dan menghayati tatanan yang berkaitan dengan politik, maka seseorang itu mengalami proses sosialisasi politik (Subiakto dan Ida, 2012: 57).

Beberapa ilmuwan sosial telah mendefinisikan sosialisasi politik itu. Herbert H. Hyman, misalnya, mendefinisikan sosialisasi politik sebagai “proses belajar dari pengalaman warga masyarakat atau subkelompok, yang semula menghasilkan keteraturan, keseragaman yang secara langsung relevan bagi stabilitas system politik dan yang kemudian menghasilkan keragaman dan bentuk-bentuk institusional dari poengawasan.”

Graber (2002: 197) mendefinisikan sosialisasi politik sebagai proses ketika orang mempelajari struktur dan faktor lingkungan, sekaligus mempelajari dan menginternalisasi aturan-aturan dan perilaku mengenai kehidupan politik. Jadi, sosialisasi mempengaruhi kualitas interaksi antara masyarakat dengan pemerintahnya, apabila suatu sosialisasi gagal untuk mempengaruhi perilaku masyarakatnya, maka semua kehidupan politik, hokum, dan semua kebijakan yang membutuhkan dukungan dari public akan gagal dan tidak berfungsi pula.

Soetandyo menjelaskan bahwa warga masyarakat, lewat sosialisasi ini, akan saling mengetahui peranan masing-masing dalam masyarakat, karena itu dia kemudian dapat bertingkah pekerti sesuai dengan peranan sosial masing-masing yang tepat sebagaimana diharapkan oleh norma-norma sosial yang ada, dan selanjutnya mereka akan dapat saling menyasikan serta menyesuaikan tingkah pekerti masing-masing sewaktu melakukan interaksi sosial.

Dengan adanya sosialisasi politik yang diberikan kepada individu, maka diharapkan akan memunculkan kesadaran politik individu untuk kemudian tidak hanya diam, tetapi melakukan aktivitas yang termasuk dalam partisipasi politik warga negara dengan berbagai macam tindakan. Sosialisasi politik paling tidak membukakan mata dan memberikan literasi politik kepada individu untuk memahami apa itu politik, peristiwa politik, dan apa yang bisa dilakukan oleh individu untuk terlibat dalam kegiatan dan mewarnai dinamika kehidupan politik di negaranya.

4. Partisipasi Politik

Dalam negara-negara demokratis umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena di artikan bahwa banyak warga negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Lagi pula, di kuatirkan bahwa, jika kurang banyak pendapat dikemukakan, pimpinan negara akan kurang tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat dan cenderung untuk melayani kepentingan beberapa kelompok saja (Budiardjo, 1981: 3).

Sementara itu, apakah yang dinamakan partisipasi politik? sebagai definisi umum menurut Budiardjo (1981: 1) dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang

untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan *contacting* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

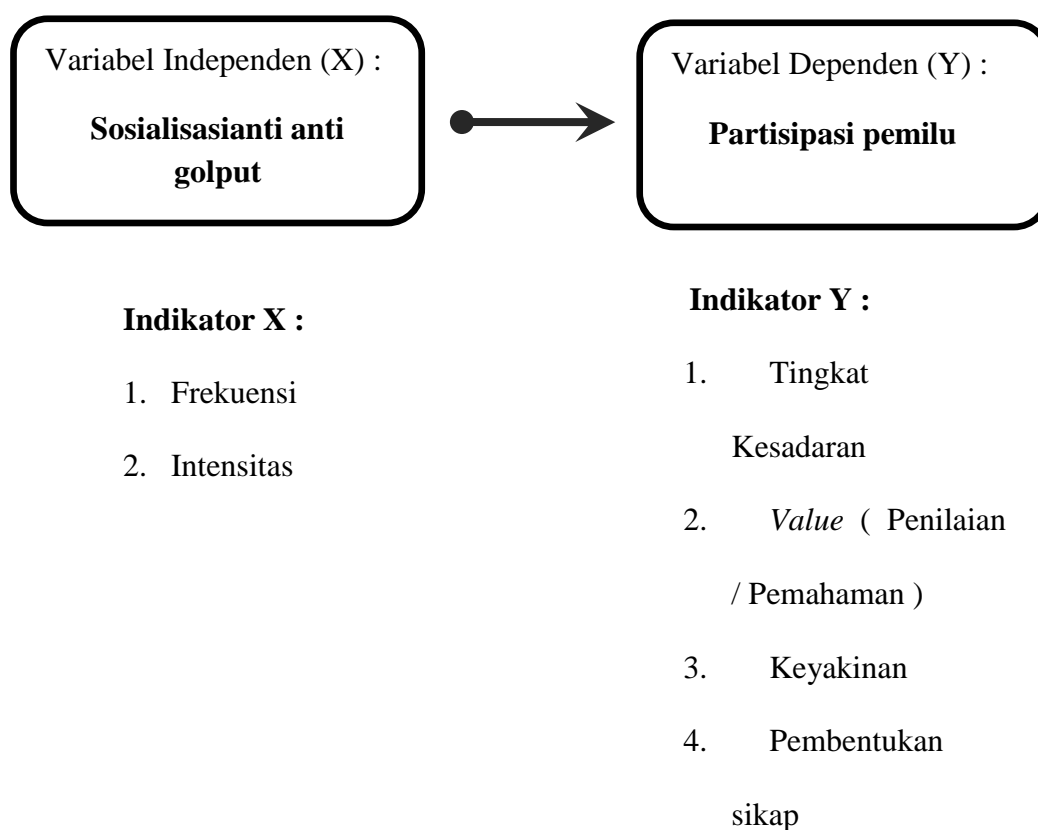
Dengan adanya sosialisasi politik yang diberikan kepada individu, maka diharapkan akan memunculkan kesadaran politik individu untuk kemudian tidak hanya diam, tetapi melakukan aktivitas yang termasuk dalam partisipasi politik warga negara dengan berbagai macam tindakan.

Menurut Subiakto dan Ida yang dikutip dari (Kaid & Haltz-Bach, 2008) partisipasi politik diartikan sebagai aktifitas warga negara yang bertujuan untuk memengaruhi kebijakan politik. Aktivitas warga negara itu meliputi pemberian suara (*voting*) menandatangani petisi, atau demonstrasi penutupan jalan. Partisipasi politik meliputi warga negara yang tidak termasuk sebagai politisi atau pejabat pemerintah termasuk pegawai negeri. Aktivitas yang dimaksud dalam partisipasi politik ini bukanlah termasuk aktifitas menonton acara debat politik di televisi atau hanya tertarik dengan politik.

Partisipasi politik yang ada disuatu negara akan menentukan kualitas demokrasi negara atau pemerintahan yang ada. Demokrasi tidak

akan berfungsi tanpa aktivitas atau tindakan minimum yang dilakukan warga negara dalam partisipasi politik (Subiakto dan Ida, 2012: 64).

F. Kerangka Berfikir dan Skema Hubungan Antar Variabel



G. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dari sebuah penelitian. Dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2008: 93). Dari

teori – teori yang sudah dijelaskan, adapun hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut :

H0 : Tidak terdapat Pengaruh Sosialisasi “Anti Golput” Terhadap Partisipasi Pemilu Presiden Tahun 2014 dikalangan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

H1 : Terdapat Pengaruh Sosialisasi “Anti Golput” Terhadap Partisipasi Pemilu Presiden Tahun 2014 dikalangan mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2010 Universitas Muhammadiyah Surakarta.

H. Definisi Konsepsional dan Operasional

1. Definisi Konsepsional

Definisi konseptual merupakan penggambaran konsep penelitian dengan menggunakan konsep-konsep lain (Silalahi, 2009: 118). Sedangkan definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut (Nazir, 1999: 152).

a. Sosialisasi Anti Golput (Variable Independen; X)

1) Sosialisasi adalah penyebaran nilai-nilai (Ardianto, 2009: 17).

2) Sosialisasi politik menurut JhonW. Ellsworth dan Artur A. Stahnke adalah proses kesadaran politik sejak kecil hingga dewasa, yaitu sebagaimana seseorang belajar nilai-nilai dan sikap sosial yang mempengaruhi kehidupan politik (Subiakto dan Ida, 2012: 57),

misalnya seperti sosialisasi anti golput yang dilakukan pemerintah menjelang pemilu.

- 3) Golput adalah mereka yang dengan sengaja tidak mau menggunakan hak suaranya pada saat pemungutan suara atau sengaja merusak suaranya.
- 4) Sosialisasi anti golput yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses belajar untuk memahami dan menghayati tatanan itulah yang disebut dengan sosialisasi. Jadi sosialisasi anti golput yang dimaksud di penelitian ini adalah pembelajaran yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya supaya tidak menjadi golput. Dengan kata lain supaya tetap berpartisipasi dalam pemilu dengan menyumbang suara yang dimilikinya.

b. Partisipasi Pemilu (Variabel Dependen; Y)

- 1) Berpartisipasi dalam pemilu adalah memberikan hak pilih/ suaranya dalam pemilihan umum.
- 2) Tidak berpartisipasi dalam Pemilu adalah tidak memberikan hak pilih / hak suara pada pemilihan umum.

2. Definisi Operasional

- a. Variabel Sosialisasi Anti Golput (Independen), diukur melalui ;
 - 1) Frekuensi Sosialisasi.
 - 2) Intensitas Sosialisasi.
- b. Variabel Tingkat Partisipasi (Dependen), diukur melalui ;
 - 1) Tingkat Kesadaran.

- 2) *Value* (Penilaian / Pemahaman)
- 3) Tingkat Keyakinan.
- 4) Pembentukan Sikap.

1. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan eksplanasi dimaksudkan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel populasi atau menjelaskan hubungan, perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain (Bungin, 2006: 38). Penelitian eksplanasi bertujuan meneliti sejauh mana variabel yang satu memiliki hubungan sebab akibat dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini digunakan untuk mencari pengaruh antara Sosialisasi anti golput dengan tingkat Partisipasi pemilu tahun 2014.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kampus UMS Fakultas Komunikasi dan Informatika yang akan dilakukan pada bulan September 2014.

3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

a. Populasi

Bungin (2005: 99) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kuantitatif berpendapat bahwa populasi adalah keseluruhan

(*universum*) dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian.

Sedangkan Sugiyono (2012: 45) mempunyai pendapat yang tidak jauh berbeda mengenai populasi, yakni:

“Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh periset untuk dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Populasi dapat berupa orang, organisasi, kata dan kalimat, surat kabar, radio, televisi, dan sebagainya.”

Populasi yang akan dijadikan objek dalam penelitian ini adalah dilihat dari kompleksitasnya, maka populasi dalam penelitian ini termasuk dalam populasi homogen. Yaitu keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifat-sifat yang relatif sama satu sama lain. Populasi ini adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UMS tahun angkatan 2010 sebanyak 148 orang.

b. Sampel

Dalam penelitian ini setelah didapatkan jumlah populasi secara keseluruhan yang meliputi mahasiswa ilmu komunikasi, tahun 2010 sejumlah 148 orang. Kemudian sampel yang didapatkan dalam populasi tersebut diambil secara acak. Adapun untuk menghitung ukuran sampel, besarnya sampel didasarkan pada pendugaan proporsi

populasi yang secara sederhana dikenal dengan rumus Yamane sebagai berikut :

Keterangan:

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

n : Jumlah sampel

N : Populasi

d : Derajat presisi (perkiraan kesalahan dalam pengambilan sampel)

1 : Bilangan konstan (Kriyantono 2010: 164).

Sesuai dengan populasi sebanyak 148 mahasiswa dengan presisinya sebesar 10% dan tingkat kepercayaan 90%. Sehingga hasil yang didapat dengan rumus tersebut adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Dimana :

n = jumlah sampel yang dicari

N = jumlah populasi

d = nilai presisi (nilai presisi dalam penelitian ini ditentukan 10 %
atau 90 %)

Dengan demikian jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{148}{148(0.1^2) + 1}$$

n = 59,677 dibulatkan menjadi 60.

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60.

c. Teknik Pengambilan Sampel

Hadi (2007:82) menyatakan bahwa sampling adalah cara yang digunakan untuk pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu probability sampling atau random sampling dan non probability sampling atau non random sampling. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *simple random sampling*, teknik pengambilan sample dari total populasi dimana semua individu baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sample.

4. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden, disebut juga angket. Tujuan penyebaran angket adalah mencari informasi yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan (Kriyantono, 2010: 97)

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk penelitian ini adalah analisis statistik inferensial. Statistik inferensial ini digunakan dalam penelitian eksplanatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih (Kriyantono: 2010; 172)

Penelitian ini menggunakan statistik parametris, yang mana untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel (Sugiyono, 2010: 149). Analisis regresi digunakan untuk mencari hubungan yang kausal (sebab-akibat) yang terjadi antara variabel independen dan variabel dependen (Kriyantono, 2010: 183).

a. Uji Validitas

Dalam suatu penelitian sangatlah penting menentukan hasil penelitian yang valid dan realibel. Hasil yang dikatakan valid adalah adanya kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi dalam objek penelitian (Sugiyono, 2010: 121).

Penelitian ini menggunakan uji validitas konstruksi, dimana validitas tersebut terdiri dari kerangka teori untuk meyakinkan pengukuran sesuai dengan kelogisan dengan kerangka teori. Ukur validitas konstruksi dengan menghitung korelasi antara data pada pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh Peneliti. Rumus yang digunakan adalah rumus Pearson Correlation (*product moment*). Teknik ini digunakan untuk mengetahui koefisien korelasi dan membuktikan hipotesis. Rumusnya sebagai berikut (Kriyantono, 2010: 175).

Rumus :

$$r = \frac{N\sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan rumus :

r : koefisien korelasi *Pearson's Product moment*

N : jumlah responden dalam sampel

X : angka mentah untuk variabel independen

Y : angka mentah untuk variabel dependen

b. Uji Reliabilitas

Penelitian ini menggunakan uji reliabilitas dengan *internal consistency*. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencoba instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen (Sugiyono, 2011;131). Pengujian ini dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari rumus Spearman Brown sebagai berikut :

Rumus :

$$r_i = \frac{2r_b}{1 + r_b}$$

Keterangan rumus :

r_i : realibilitas internal seluruh instrument.

r_b : korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.

c. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan analisis regresi linier sederhana, maka model regresi linier sederhana dengan satu variabel bebas tersebut harus lolos uji asumsi klasik, yang merupakan syarat berlakunya analisis regresi. Oleh karena itu menurut Ghozali (2005: 69) harus

dilakukan uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastitas, dan uji normalitas.

1) Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005: 110) uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normalitas data dari masing-masing variabel. Penelitian ini digunakan uji normalitas *Kolmogrov-Smirnov* dengan kriteria, jika nilai signifikansi hitung lebih besar dari 0,1 maka model regresi memenuhi asumsi normalitas dan sebaliknya jika nilai signifikansinya $< 0,1$ maka tidak lolos uji.

2) Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2005: 91) uji multikolinieritas dimaksudkan untuk menguji apakah model regresi bebas multikolinieritas atau tidak. Memperhatikan nilai toleransi dan nilai VIF (*Variance Inflation factor*), apabila nilai VIF > 10 dan nilai tolerance $< 0,10$, maka variabel tersebut terjadi multikolinearitas, sebaliknya apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance $> 0,10$ maka variabel tersebut bebas multikolinearitas.

3) Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2005: 95) uji Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah model mengandung autokorelasi atau tidak, yaitu adanya hubungan diantara variable independen dalam mempengaruhi variable dependen. Ketentuan yang umum digunakan adalah apabila angka D-W dibawah -2 berarti korelasi

positif, bila angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi dan bila diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

4) Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2005: 69) uji heteroskedastisitas ini untuk mengetahui apakah dalam model regresi ini terjadi ketidak samaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji ini dapat dideteksi dengan uji Glejser. Apabila p value > 0,1 maka lolos uji heteroskedastisitas, sebaliknya apabila nilai p value < 0,1 maka tidak lolos uji heteroskedastisitas.

d. Uji Hipotesis

✓ Regresi Linier Sederhana

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana yaitu adanya variabel bebas X dan yang mana variabel terikat Y dapat dihitung dengan prediksi berdasarkan nilai X tertentu.

Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

Rumus :

$$Y = a + bX$$

Keterangan rumus :

Y : variabel tidak bebas (variabel dependen yang diprediksi)

X : variabel bebas (subjek pada variabel independen yang memiliki nilai tertentu)

a : nilai konstan tau harga Y bila $X = 0$

b : koefisien regresi (angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang berdasarkan pada variabel independen, sedangkan bila $b(+)$ maka naik, sedangkan jika $b(-)$ maka terjadi penurunan.

Nilai a dihitung dengan rumus :

$$a = \frac{\sum y - (\sum x^2) - \sum x \sum xy}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

Untuk menghitung nilai b dengan rumus :

$$b = \frac{n \sum y - \sum x \sum xy}{2 \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

✓ Uji t

Uji t digunakan untuk menguji apakah pernyataan hipotesis benar (Setiaji, 2005 : 30). Rumus uji t yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{b}{S_b}$$

Keterangan :

b : koefisien regresi masing-masing variabel

S_b : standar error koefisien regresi masing-masing variabel

Tahap-tahap pengujian:

1) Hipotesis

$H_0 : b = 0$, artinya tidak ada pengaruh antara sosialisasi anti golput terhadap partisipasi pemilu.

$H_a : b \neq 0$, artinya ada pengaruh antarasosialisasi anti golput terhadap partisipasi pemilu.

Tingkat signifikansi $\alpha = 0,1$

2) Kriteria pengujian

H_0 diterima apabila $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$.

H_0 ditolak apabila $t \text{ hitung} \leq -t \text{ tabel}$ atau $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$.

3) Keputusan

Apabila H_0 diterima berarti variabel-variabel independen (Sosialisasi anti golput) yang diuji dalam uji t secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (partisipasi pemilu).

Jika H_0 ditolak artinya variabel-variabel independen (Sosialisasi anti golput) yang diuji dalam uji t secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (partisipasi pemilu).

✓ Uji F

Uji F-statistik digunakan untuk menguji apakah variabel independen (Sosialisasi anti golput) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen (partisipasi pemilu).

Rumus uji F yang digunakan adalah (Setiaji, 2005 : 44):

$$F \text{ hitung} = \frac{R^2 / k-1}{(1-R^2) / n-k}$$

Keterangan :

R^2 : koefisien determinasi

k : derajat bebas pembilang

($n-k$) : derajat bebas penyebut

Tahap-tahap pengujian:

1) Hipotesis

$H_0 : b_1=b_2 = 0$ (tidak ada pengaruh antara sosialisasi anti golput terhadap partisipasi pemilu).

$H_a : b_1 \neq b_2 > 0$ (ada pengaruh antarsosialisasi anti golput terhadap partisipasi pemilu).

Tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$

2) Kriteria pengujian

H_0 diterima apabila F hitung $< F$ tabel.

H_0 ditolak apabila F hitung $> F$ tabel.

3) Keputusan

Apabila H_0 diterima artinya tidak ada pengaruh variabel independen (sosialisasi anti golput) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (partisipasi pemilu) sehingga hipotesis penelitian tidak terbukti. Namun apabila H_0 ditolak berarti ada pengaruh variabel independen (sosialisasi anti golput) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (partisipasi pemilu), sehingga hipotesis penelitian terbukti.

- Koefisien Determinasi

Analisis koefisien determinasi ini untuk mengetahui besarnya sumbangan pengaruh variabel independen (sosialisasi anti golput)

terhadap variabel dependen (partisipasi pemilu) yang ditunjukkan dengan persentase.

$$R^2 = \frac{b_1 \sum YX_1}{Y^2}$$

Keterangan :

R^2 = Nilai Koefisien Determinasi

Y = Partisipasi Pemilu

a = Konstanta

X_1 = Sosialisasi anti golput

b_1 = koefisien regresi masing-masing variabel